**NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA (\***

**DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN KERATON NUSANTARA**

(*Penemuan, Pencerahan, dan Pembumian Pancasila sebagai*

*Wahyu Kenegaraan di Bumi Nusantara)*

Oleh:

Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH.MH. (\*\*

1. **Latar Belakang**

Penemuan Pancasila pada hakikatnya tidak lepas dari ruang keilahia-an, sehingga dari sisi perspektif kekalbuan keberadaan Pancasila di bumi Nusantara merupakan bukti adanya respon illahiah dalam konteks nuraninya nurani, hatinya hati, jantungnya jantung yang ada ada manusia di Bumi Nusantara. Oleh karena itu, untuk menerawang nilai-nilai luhur Pancasila dalam praktik ketatanegaraan Keraton Nusantara tidak dapat menghindari dimensi spiritual dan kegaiban Tuhan.[[1]](#footnote-1)

Dari sisi normative, Pancasila disepakati sebagai landasan filosofis yang berkualitas “*groundnorm*” sehingga diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, dimana seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Namun sayangnya, phenomena menunjukkan bahwa bangsa Nusantara (kini: Indonesia) saat ini secara eksisting terjebak ke dalam ruang ketersesatan dalam pembumian nilai-nilai sakral Pancasila dalam praktik hukum yang berlangsung yang berkonsekuensi bangsa ini belum mampu meraih tujuan Negara Nusantara yang dicita-citakan yaitu masyarakat adil dan makmur.[[2]](#footnote-2)

Pancasila dalam dimensi ketatanegaraan telah disepakati untuk diposisikan sebagai “*Groundnorm*”. Konsekuensi logisnya adalah bahwa setiap kehidupan ketatanegaraan yang berlangsung harus menjabarkan dan membumikan nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila dari Pancasila. Eksistensi Pancasila berada pada puncak piramida system ketatanegaraan yang akan memandu system pemerintahan dalam meraih tujuan mulia yang telah dicita-citakan bersama sejak jaman kedaulatan keraton-keraton Nusantara.

Untuk memberikan pencerahan dalam perikehidupan ketatanegaraan masa kini, maka makalah ini diarahkan untuk melakukan “*reinventing*” atau menemukan kembali kesejatian Pancasila dalam praktik ketatanegaraan masa lampau yang diperankan oleh keraton-keraton Nusantara. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dalam rangka membangun Indonesia secara penuh dan menyeluruh di atas dasar filosophis Pancasila sebagai kristalisasi kesejatian manusia Nusantara dengan karakter budayanya.

1. **Menemukenali Nilai-nilai Pancasila**

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya adalah bahwa seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam konteks inilah maka Pancasila merupakan suatu asas kerohanian negara, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma dan kaidah hukum dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang tatkala ditarik dalam dimensi keghaiban Tuhan, maka sejatinya Pancasila merupakan manifestasi dari Wahyu Kenegaraan yang diperuntukkan bagi kehidupan bernegara di bumi Nusantara ini.

Kedudukan Pancasila sebagaimana dikemukakan di atas, selain mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka dalam dimensi metafisika sebenarnya Pancasila merupakan Roh dan Jiwa dari Negara Nusantara yang kini bernama Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber hukum dasar bagi Negara, baik yang tertulis yaitu UUD negara maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi.

Pancasila bukanlah suatu agama, tetapi suatu falsafah yang diyakini dan disepakati sebagai suatu kebenaran yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur yang didasarkan pada ajaran agama. Dalam dimensi spiritual, Pancasila merupakan ajaran yang menekankan bahwa manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang merupakan perpaduan dirinya sebagai mahluk individu yang beriman dan bertakwa dengan dirinya sebagai mahluk sosial yang bermoral dan berahlak mulia. Oleh karena itu, pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan mencerminkan moral dan akhlak seseorang yang secara kumulatif akan menggambarkan moral dan akhlak suatu komunitas (bangsa Indonesia). Kelima sila dalam Pancasila saling terkait dan saling jiwa menjiwai yang tak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus dilihat secara utuh, terpadu dan menyeluruh dari sila kesatu sampai dengan sila kelima.

Pada sila pertama dari Pancasila menunjukkan bahwa Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu, Yang Maha Esa, segala sesuatu tergantung kepada-Nya, maka manusia Indonesia akan mengembangkan toleransi antar umat beragama, toleransi sesama umat beragama, dan toleransi antar umat beragama dengan negaranya. Tidak akan memaksakan agama kepada pemeluk agama lain. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang sekuler atau memisahkan agama dan negara. Indonesia juga bukan negara agama yang mendasarkan kepada agama tertentu.

Pada sila kedua dari ancasila telah mengarahkan bahwa manusia memiliki hakikat pribadi yang mono-pluralis terdiri atas susunan kodrat  jiwa, raga, serta berkedudukan sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai luhur kemanusiaan akan menumbuhkan sikap tepasalira, menghormati hak asasi manusia, anti penjajahan, mengutamakan kebenaran dan keadilan, mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan sebagainya.

Pada sila ketiga dari Pancasila menegaskan adanya pengakuan terhadap hakikat satu tanah air, satu bangsa, dan satu Negara Indonesia, tidak dapat dibagi sehingga seluruhnya merupakan suatu keseluruhan dan keutuhan. Nilai luhur persatuan terkandung di dalam cinta tanah air, tidak membeda-bedakan sesame warga negara Indonesia, cinta perdamaian dan persatuan, tidak mengagung-agungkan bangsa sendiri, suku, dan daerah tertentu.

Pada sila keempat dari Pancasila mengarahkan untuk menjunjung dan mengakui adanya rakyat yang meliputi keseluruhan jumlah semua orang warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu yang segala sesuatunya berasal dari rakyat dilaksanakan oleh rakyat, dan diperuntukkan untuk rakyat. Nilai luhur kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan antara lain terkandung makna cinta permusyawaratan, cinta demokrasi, tidak memaksakan kehedak kepada orang lain, menghindari kekerasan dalam menyelesaikan masalah, tidak mementingkan diri sendiri, cinta kebersamaan, dan sebagainya.

Pada sila kelima dari Pancasila secara tegas mengakui hakekat adil berupa pemenuhan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah mencintai keadilan social, cinta kekeluargaan, suka bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa lain, dan menganggap bangsa lain sederajat.

Di dalam struktur sistemik maka sila pertama menjiwai dan mendasari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima; sila kedua dijiwai dan didasari sila pertama, menjiwai dan mendasari sila ketiga, keempat, dan kelima; sila ketiga dijiwai dan didasari sila pertama dan kedua, menjiwai dan mendasari sila keempat dan kelima; sila keempat dijiwai dan didasari sila pertama, kedua, dan ketiga, menjiwai dan mendasari sila kelima; sila kelima dijiwai dan didasari sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Inilah yang dinamakan hierarkis pyramidal dari Pancasila.

Dengan demikian, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan sumber nilai di Indonesia maka semua nilai yang berkembang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

1. **Nilai Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Keraton Nusatara**

Sejarah kebesaran Negara Nusantara tidak dapat dipisahkan dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit yang pernah hadir di bumi Nusantara. Tanpa mengurangi arti dan peran keraton-keraton Nusantara lainnya yang pernah hadir di Bumi Nusantara dan sebagian masih eksis hingga saat sekarang dalam bingkai NKRI. Tulisan ini hanya difokuskan pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam system ketatanegaraan yang pernah berlangsung pada jaman Kerajaan Majapahit, dengan pertimbangan kerajaan ini sedikit banyaknya telah mempengaruhi sistem ketatanegaraan yang berlangsung di Negara-negara bawahan dan daerah bawahan saat itu.

Tidak dapat disangkal bahwa kerajaan Majapahit sangat berpengaruh di Bumi Nusantara. Ketika nusantara dipersatukan kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), gagasan warisan Majapahit tampil dalam konsep kepemimpinan nasional. Ciri kepemimpinan nasional-pun terpengaruh oleh ide-ide kerajaan Majapahit. Dengan demikian, dalam rangka memajukan kebudayaan nasional, kebudayaan Majapahit memberikan sumbangsih yang besar maknanya. Misalnya saja, semboyan negara ***Bhinneka Tunggal Ika***, adalah berasal dari kata mutiara yang dirangkai oleh Empu Tantular, seorang pujangga istana Majapahit pada abad ke-13 Masehi.

Pada zaman Majapahit perkembangan kitab-kitab kesusasteraan pesat sekali. Misalnya Parthayadnya, Nitiçastra, Nirarthaprakrêta, Dharmaçunya, Hariçraya, Tantu Panggêlaran, Calon Arang, Tantri Kamandaka, Korawaçrama, Pararaton, Déwaruci, Sudamala Kidung Subrata, Panji angrèni dan Sri Tanjung.[[3]](#footnote-3) Karya sastra pada zaman Majapahit itu terdiri dari kitab-kitab Jawa Kuno yang tergolong muda dan sebagian lagi berbahasa Jawa Tengahan. Kitab-kitab ini juga memberi pedoman tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan moralitas kenegaraan.

Filsafat kenegaraan yang berasal dari jaman Majapahit yang hingga kini tetap populer adalah motto kebangsaan ***Bhinneka Tunggal Ika*** yang dikutip dari kitab Sutasoma buah karya Empu Tantular. Menurut kajian Toru Aoyama,[[4]](#footnote-4) ahli sastra Jawa Kuno berkebangsaan Jepang dikatakan sebagai berikut, “*Bhinneka tunggal ika”, a national slogan of the Republic of Indonesia, is customarily translated into English as “unity in diversity” referring to “the unity of Indonesia as the national and its ethnic diversity”. The phrase is taken from the kakawin Sutasoma, composed by the fourteenth century poet mpu Tantular.*

Pada zaman Majapahit telah dikenal konsep otonomi daerah, dimana pengertian daerah otonom pada abad empat belas berbeda dengan pengertian koloni dalam zaman modern. Persembahan pajak yang tidak banyak nilainya, oleh daerah tertentu kepada Majapahit sudah dapat dianggap sebagai bukti pengakuan kekuasaan Majapahit atas daerah yang bersangkutan dan karenanya daerah itu dianggap sebagai daerah otonom.[[5]](#footnote-5)

 Ditinjau dari sudut politik timbulnya Majapahit sebagai kekuasaan besar di Asia Tenggara yang sanggup menghimpun berbagai daerah dan kepulauan di bawah lindungan satu negara, merupakan peristiwa sejarah yang belum pernah terjadi.[[6]](#footnote-6) Penyatuan Jawa dan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit menyebabkan timbulnya kuasa besar yang ditakuti oleh negara-negara tetangga di daratan Asia. Pertumbuhan tersebut membawa banyak akibat, di antaranya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Bertambah luas wilayahnya, bertambah sukar memerintahnya dan bertambah besar jumlah alat pemerintahannya.[[7]](#footnote-7) Di Jawa ada sebelas daerah otonom, masing-masing diperintah oleh raja dan lima daerah atau propinsi yang disebut mancanegara, masing-masing diperintah juru pangalasan atau adipati, yakni: 1. Daha, diperintah oleh Bre Daha alias Dyah Wiyat Sri Rajadewi; 2. Wengker, diperintah oleh raja Wijayarajasa; 3. Matahun, diperintah oleh raja Rajasa Wardana; 4. Lasem, diperintah oleh Bre Lasem; 5. Pajang, diperintah oleh Bre Pajang; 6. Paguhan. diperintah oleh raja Singa Wardana; 7. Kahuripan, diperintah oleh Tribuwana Tunggadewi; 8. Singasari, diperintah oleh raja Kerta Wardana; 9. Mataram, diperintah oleh Bre Mataram alias Wikrama Wardana; 10. Wirabumi, diperintah oleh Bre Wirabumi; 11. Pawanuhan, diperintah oleh putri Surawardani.

Semua pemegang kuasa di daerah otonom adalah keluarga raja Majapahit. Lima provinsi yang disebut mancanagara disebut menurut kiblat, yakni utara, timur, selatan barat dan pusat, masing-masing diperintah oleh Juru Pangalasan yang bergelar Rakryan. Baik daerah otonom maupun daerah mengambil pola pemerintahan pusat. Raja dan juru pangalasan adalah pembesar yang bertanggung jawab namun pemerintahannya dikuasakan kepada patih sama dengan pemerintahan pusat, di mana raja Majapahit adalah orang yang bertanggung jawab, tetapi pemerintahannya ada di tangan patih amangkubumi atau patih seluruh negara. Itulah sebabnya para patih jika datang ke Majapahit mengunjungi gedung kepatihan amangkubumi yang dipimpin oleh Gajah Mada. Administrasi pemerintahan Majapahit dikuasakan kepada lima pembesar yang disebut sang panca ri Wilwatikta yakni, patih seluruh negara, demung, kanuruhan, rangga dan tumenggung. Mereka itulah yang banyak dikunjungi oleh para pembesar daerah otonom dan daerah untuk urusan pemerintahan. Apa yang direncanakan di pusat, dilaksanakan di daerah oleh para pembesar tersebut. Dari patih perintah turun ke wedana, semacam pembesar distrik; dari wedana turun ke akuwu, pembesar sekelompok desa, semacam lurah zaman sekarang; dari akuwu turun ke buyut, pembesar desa dari buyut turun kepada penghuni desa.[[8]](#footnote-8)

 Dalam dimensi diplomasi, Majapahit melakukan strategi diplomasi yang bersahabat dengan beberapa negara yang memang mempunyai hubungan persahabatan dengan Majapahit seperti Syangka, Ayudaputra, Darmaanagari, Marutama, Rajaputra, Campa, Kamboja dan Yawana.[[9]](#footnote-9) Daftar nama itu hampir serupa dengan nama-nama yang disebut tentang tamu-tamu asing yang sering berkunjung ke Majapahit, terutama para pedagang dan para pendeta.

Hubungan persahabatan itu didasari atas kunjungan para pedagang dan pendeta bukan karena perwakilan asing timbal balik di negara-negara yang bersangkutan seperti sekarang. Tali persahabatan itu dimaksudkan sebagai usaha untuk menghindarkan serbuan tentara asing ke daerah otonom Majapahit di seberang lautan, terutama di Semenanjung Tanah Melayu karena negara-negara tetangga itu kebanyakan berbatasan atau berdekatan dengan daerah bawahan tersebut. Lagipula sebagian besar negara itu menganut agama Hindu/Budha seperti,Majapahit.[[10]](#footnote-10)
 Tata pemerintahan negara Majapahit yang terjadi pada zaman pemerintahan Prabu Hayamwuruk sebagaimana digambarkan dalam Nagarakretagama bahwa Negara mempunyai pertalian erat dengan wilayah yang terbatas. Raja-raja di pulau Jawa yang mempunyai hubungan dengan Prabu Hayamwuruk dan masing-masing mempunyai kekuatan penuh di negaranya seperti Tri Buwana Tungga Dewi di Kahuripan, Kerta Wardana di Singasari, Wijaya Rajasa di Wengker, Dyah Wyah Rajadewi di Daha, Bre Wirabumi di Wirabumi, Dyah Suwawardani di Pawawanuhan, Bre Lasem di Lasem, Rajasa Wardana di Matahun, Bre Panjang di Panjang, Singa Wardana di Paguhan. Mereka itu semuanya tunduk kepada Majapahit. Negaranya adalah bawahan Majapahit. Para raja di pulau Jawa masing-masing mempunyai negara dan Wilwatikta tempat mereka bersama menghamba raja.[[11]](#footnote-11)

 Pada Prasasti Penanggungan 1296 terdapat persamaan antara susunan pemerintahan Majapahit dan daerah otonom Daha seperti berikut :

Rakryan patih : Empu Tambi

Rakryan patih Daha : Empu Sora

Rakryan Demung : Empu Renteng

Rakryan Demung Daha : Empu Rakat

Rakryan Kanuruhan : Empu Elam

Rakryan Kanuruhan Daha : Empu Iwar

Rakryan Rangga : Empu Sasi

Rakryan Rangga Daha : Empu Dipa

Rakryan Tumenggung : Empu Wahana

Rakryan Tumenggung Daha : Empu Pamor

Patih daerah otonom dan daerah mempunyai tanggung jawab langsung dalam pemerintahan di daerah. Wilayah daerah dibagi dalam beberapa bagian, masing-masing dipimpin oleh wedana. Satu Kewedanan dibagi dalam beberapa kelompok desa, masing-masing dipimpin oleh akuwu. Tiap pakuwuan terdiri dari beberapa desa masing-masing dipimpin oleh buyut atau ketua desa. Demikianlah pembagian wilayah Majapahit dalam pemerintahan yang dikendalikan dari pusat oleh patih amangkubumi sebagai pembantu utama raja dalam soal pemerintahan.
 Kepala negara Majapahit adalah seorang raja yang memperoleh kekuasaan berkat keturunan kecuali raja Kertarajasa Jaya Wardana, raja pertama.[[12]](#footnote-12) Di samping memegang pucuk pimpinan dalam pemerintahan, raja Majapahit juga merupakan kepala dalam lingkungan kerabat raja, berkat kedudukannya. Tanggung jawab negara sepenuhnya ada di tangan raja. Dalam melaksanakan pemerintahan raja dibantu oleh berbagai pejabat berbagai bidang yang diangkat oleh Ingkang Sinuwun Prabu. Dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah dan mengambil keputusan yang penting seperti misalnya pengangkatan patih amangkubumi atau pejabat penting lainnya raja dibantu oleh para kerabat karena urusan negara dalam kerajaan adalah urusan kerabat raja. Sebelum mengambil keputusan mengenai perkara yang penting Ingkang Sinuwun mengadakan musyawarah dengan para kerabat.[[13]](#footnote-13) Kerabat raja itu dapat di sebut Dewan Pertimbangan Agung pemerintah Majapahit.[[14]](#footnote-14)

Pada zaman Majapahit para pegawai pemerintahan disebut tanda, masing-masing diberi sebutan atau gelar sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.[[15]](#footnote-15) Ditinjau dari gelar sebutannya seperti yang terdapat pada berbagai Prasasti, para tanda Majapahit dapat di bagi atas tiga golongan yaitu: (i) Golongan Rakryan;[[16]](#footnote-16) (ii) Golongan Arya;[[17]](#footnote-17) dan (iii) Golongan Dang Acarya.[[18]](#footnote-18)

 Dari Pararaton dan Nagarakretagama dapat diketahui bahwa system pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan baik dan berjalan lancar. Konsep politik yang dibangun menyatu dengan konsep “*jagat raya*”, yang melahirkan pandangan “*cosmoginos*”, dimana Majapahit sebagai sebuah kerajaan mencerminkan doktrin tersebut, kekuasaan yang bersifat teotorial dan desentralisasi dengan birokrasi yang terinci. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarkhi kerajaan. Untuk terlaksananya kekuasaan, raja dibantu oleh sejumlah pembantu yang digolongkan kedalam pejabat-pejabat birokrasi kerajaan.

Dalam Nagarakretagama pupuh 89: 2, memberitakan bahwa hubungan Negara dengan desa begitu rapat seperti Singa dengan hutan. Jika desa rusak, Negara akan kekurangan bahan makanan. Hal ini seperti yang diberitakan dalam Negarakretagama bahwa: “*Negara dan Desa bersambung rapat seperti singa dan hutan, jika desa rusak maka Negara akan kekurangan bahan makanan. Kalau tidak ada tentara, Negara lain mudah menyerang kita, karenanya peliharalah keduanya, itu perintah saya”.*

Adapun struktur birokrasi dalam hierarkhi Majapahit dari tingkat pusat ke jabatan yang lebih rendah dapat dikemukakan dalam skema sebagai berikut:

 Skema 1

 Struktur Birokrasi Kerajaan Majapahit

 **RAJA**

PASANGGUHAN

(4 ORANG)

PARA PATIH NEGARA BAWAHAN

KERABAT RAJA

(DPA)

MAHA MANTRI KATRINI

(3 ORANG)

SANG PANCA WILWATIKTA

(5 ORANG)

DHARMADYAKSA

DAN

UPAPPATI

(7 ORANG)

JURU PANGALASAN

(PEMBESAR DAERAH MANCANEGARA)

Pada setiap tingkatan birokrasi yang terdapat dalam struktur birokrasi kerajaan Majapahit sebagaimana digambarkan di atas menjalankan fungsinya masing-masing dengan tetap menghormati dan menghargai fungsi-fungsi yang diperankan oleh setiap tingkatan birokrasi yang ada. Setiap tingkatan birokrasi diwajibkan untuk menciptakan kedamaian bagi seluruh kawulo atau rakyat. Kedamaian adalah situasi yang menggambarkan tidak adanya konflik dan kekerasan. Segala unsur yang terlibat dalam suatu proses sosial  berlangsung secara selaras, serasi dan seimbang, sehingga menimbulkan keteraturan, ketertiban dan ketenteraman. Segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dapat terpenuhi, sehingga tidak terjadi perebutan kepentingan. Kondisi yang terdapat pada system ketatanegaraan tersebut merefleksikan adanya nilai kedamaian, salah satu nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

 Bahwa keterlibatan para pemuka agama (pandito) sebagai person yang mengisi struktur darmadyaksa menunjukkan bahwa struktur ketatanegaraan pada jaman Majapahit menempatkan nilai keimanan di dalam dimensi ketatanegaraan. Dengan memerankan para pandito untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di tengah masyarakat, maka terdapat suatu sikap yang menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan transendental yang disebut Tuhan Yang Maha Esa.

Keyakinan bahwa Raja adalah wakil Tuhan di permukaan bumi (*khalifatullah atau khalifah Allah*) untuk menciptakan kedamaian dan kesejateraan, serta mengatur alam semesta, menunjukkan bahwa *Sabda Pandito Ratu* atau apa yang dititahkan oleh Raja maka manusia wajib untuk menerima dengan keikhlasan dan sikap berserah diri secara ikhlas dan rela diatur oleh Raja sebagai wakil Tuhan Yang Maha Esa, bersedia tunduk dan mematuhi segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai keghaipan Allah harus termanifestasikan ke dalam sikap tindak Raja sebagai Khalifatullah. Hal ini juga diakui oleh Keraton Yogyakarta dengan nilai Asma Dalem yang menegaskan: “*Ngersa dalem sampeyan dalem Hingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ngabdurrahman Sayidin Panotogama Khalifatullah ing Ngayogyakarta Hadiningrat*”.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan yang diemban oleh Raja (Sultan) sebagai wakil Tuhan atau Khalifatullah, maka seorang Raja/Sultan harus mengedepankan keadilan bagi semuanya. Keadilan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban serta harkat dan martabatnya secara proporsional diselaraskan dengan peran fungsi dan kedudukannya. Hal ini sangat sesuai dengan nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila.

Prinsip dasar tentang “*manunggaling kawulo lan gusti*” yang melandasi kepemimpinan Raja Sultan Nusantara menunjukkan adanya sikap saling menghormati sesama manusia, dimana rakyat dan raja harus bersatu dalam menggapai tujuan bersama. Hal ini menunjukkan adanya sikap dan nilai  *kesetaraan sebagai sesama manusia.* Kesetaraan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan jender, suku, ras, golongan, agama, adat, budaya, dan lain-lain. Setiap orang  diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam segenap bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Adanya keyakinan tentang kesatuan manusia dengan alam jagat raya yang dipenuhi oleh nilai keghaiban Tuhan, dimana manusia diyakini terdiri dari unsur air, api, angin, dan bumi/tanah menunjukkan bahwa di kehidupan keraton sangat menghargai keselarasan sebagai sumber terjadinya keteraturan, ketertiban dan ketaatan karena setiap makhluk melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional, sehingga timbul suasana harmoni, tenteram dan damai. Ibarat suatu orkestra, setiap pemain berpegang pada partitur yang tersedia, dan setiap pemain instrumen melaksanakan secara taat dan tepat, sehingga terasa suasana nikmat dan damai. Kondisi yang teratur dalam dimensi keselaran manusia dengan alam jagat raya tersebut telah pula membentuk keberadaban di dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga kondisi tersebut menggambarkan bahwa setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada ketentuan yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa. Beradab menurut bangsa Indonesia adalah apabila nilai yang terkandung dalam Pancasila direalisasikan sebagai acuan pola fikir dan pola tindak.

Kesadaran akan perbedaan dan kemajemukan yang terdapat di tengah masyarakat pada jaman kerajaan Majapahit telah melahirkan suatu adagium “*Bhineka Tunggal Ika*” yang kini telah menjadi suatu norma dasar dalam membangun persatuan dalam kebersamaan dan kemajemukan. Persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Nusantara yang terdiri atas beranekaragamnya komponen namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setiap komponen dihormati dan menjadi bagian integral dalam satu sistem kesatuan negara-bangsa Nusantara.

Di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, masih dikenal suatu perumpamaan “*Sumping berbentuk Daun Sirih*” yang mengartikan bahwa seorang Sultan harus menjadi pendengar yang baik, baik berupa kritikan maupun pujian sehingga dalam melakukan tindakan, baik itu berupa ucapan ataupun tindakan harus dicernah betul seperti mengunyah daun sirih sampai lumat betul. Perumpamaan ini secara substansial bersesuaian dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Demikian pula dengan keberadaan adat istiadat yang dikenal dengan istilah Paugeran, yang merupakan tradisi budaya baik yang tertulis dan apa pula yang tidak tertulis (melekat) yang berlaku baik di dalam kraton maupun di luar kraton.[[19]](#footnote-19)

1. **Penutup**

Nilai-nilai Pancasila pada jaman keraton Nusantara termanifestasikan dalam konsep keselarasan antara manusia dengan alam jagat raya yang dikembangkan dalam system ketatanegaraan keraton dengan landasan adat tradisi (paugeran). Keselarasan antara manusia dan alam jagat raya baik dalam dimensi makrokosmos maupun mikrokosmos diletakkan di dalam ruang keghaiban Tuhan sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh kawulo dan gusti (rakyat dan raja/pemerintah) harus merefleksikan sifat-sifat Tuhan.

Adanya konsep keselarasan antara manusia dengan alam jagat raya yang dibangun oleh setiap keraton Nusantara menunjukkan bahwa tatanan kenegaraan pada keraton Nusantara dibangun dengan konsep keteraturan alam jagat raya baik alam makrokosmos maupun alam mikrokosmos, yang pada analisis akhir bermuara pada pengakuan atas eksistensi Tuhan. Konsep keselarasan dan keteraturan untuk menggapai kedamaian dan kebahagiaan telah menempatkan Raja/Sultan sebagai wakil tuhan di permukaan bumi untuk membumikan sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, seorang raja harus memiliki sikap tindak yang selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan serta selalu menyatu dengan rakyatnya atau yang sering disebut dengan istilah manunggaling kawulo lan gusti.

Keberadaan Pancasila sebagai dasar Negara NKRI bukan berada dalam vacuum keghaiban Tuhan, akan tetapi sarat dengan kehendak Tuhan untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian dalam kemajukan budaya (Bhineka Tunggal Ika). Oleh karena itu, eksistensi Pancasila bagi Negara Nusantara Indonesia seyogianya diposisikan sebagai bagian dari campur tangan Tuhan di bumi Pertiwi Indonesia. Untuk menggapai tujuan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan, maka bangsa ini harus kembali pada jati dirinya yakni Negara yang ber Pancasila.

**DAFTAR PUSTAKA**

Brandes, 1896. *Pararaton at het Boek der Koningen van Tumapel en van Majapahit*.

Bratadiningrat, 1990, *Asalsilah Warna Warni*, Surakarta.

Darusuprapta. 1984. *Babad Blambangan Pembahasan*, Suntingan Naskah, Yogyakarta: Disertasi UGM.

Meinsma. 1903. *Serat Babad Tanah Jawi, Wiwit Saking Nabi Adam Dumugi ing Tahun 1647*. S’Gravenhage.

Moedjanto, 1994. Konsep *Kekuasaan Jawa, Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius.

Pigeaud, 1924. *De Tantu Panggelaran Uitgegeven, Vertaald en Toegelicht*. Disertasi Leiden.

Poerbatjaraka, 1964. *Kapustakan Jawi*, Jakarta : Djambatan.

Prijana, 1938. Sri Tanjung, *een dud Javaansch Verhaal*. Disertasi Leiden.

Priyohutomo, 1934. *Nawaruci*. Groningen: JB. Wolters Uitgevers Maatschapij.

Ricklefs, 1995. *Sejarah Indonesia Modern*. Terjemahan Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Slamet Mulyono, 1979. *Negara Kertagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhatara.

Suyamto, 1992. *Refleksi Budaya Jawa dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. Semarang: Dahana Prize.

Toru Aoyama, 1991, *Kitab Sutasoma*. Canberra: Australisan National University.

Zoetmulder, 1985. Kalangwan: Sastra Jawa Kuna Selayang Pandang.

1. \*)Makalah ini disampaikan pada Kajian Rutin yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, yang diadakan di Ruang Sidang UPT Pusat Pengkajian Pancasila UM pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016.

 \*\*)Penulis adalah Guru Besar Hukum Ekonomi Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan sebagai Ketua Pengembangan dan Kerjasama antara Lembaga Ikatan Cendekiawan Keraton Nusantara.

 Bahwa ketika kita menukik hingga palung nilai Pancasila yang paling dalam, maka kita akan meraih hakikat dalam rangkulan kemahrifatan Tuhan yang terdapat pada setiap nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yang pada analisis akhir akan mengerucut pada dimensi kegaiban Illahiah dalam respon-Nya terhadap system ketatanegaraan Negara Nusantara. [↑](#footnote-ref-1)
2. Untuk meraih kemakmuran yang berkeadilan dalam ruang kebahagiaan bagi seluruh rakyat yang ber-Bhineka Tunggal Ika, maka secara hakiki Allah telah menurunkan Wahyu Kenegaraan bagi bangsa Nusantara ini yang terkemas dalam wujud PANCASILA sebagai kristalisasi kesejatian bangsa dengan kekhasan budaya dan manusia Nusantara-nya, yaitu suatu bangsa yang dihadirkan untuk merangkul hakikat kebersamaan dalam perbedaan. Saat ini manusia Indonesia banyak yang terjebak pada nilai cultural bangsa lain yang jauh dari nilai keIndonesian sejati sehingga eksistensi manusia Indonesia banyak yang telah terjajah oleh karakter kemanusiaan bangsa lain. [↑](#footnote-ref-2)
3. Baca lebih lanjut dalam Brandes, 1896. *Pararaton at het Boek der Koningen van Tumapel en van Majapahit.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Toru Aoyama, 1991, *Kitab Sutasoma*. Canberra: Australisan National University. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dalam Nagarakretagama pupuh 16 memberikan petunjuk bahwa pada musim-musim tertentu, pemerintah pusat mengirimkan pegawai dan pendeta-pendeta ke daerah untuk menarik upeti. Ditegaskan bahwa di saming tugas utama itu para pendeta dianjurkan menyebarkan agama dan memberantas penyesatan. Para pendeta Budha hanya diizinkan menyiarkan agamanya di daerah sebelah Timur Jawa, sedangkan para pendeta Siwa boleh menjelajah segala pulau untuk menyiarkan agamanya tanpa mengenal pembatasan. Lihat lebih lanjut dalam Slamet Muljana, 2006, *Tafsir Sejarah Nagarakretagama*, LKiS Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-5)
6. Darusuprapta. 1984. *Babad Blambangan Pembahasan, Suntingan Naskah*, Yogyakarta: Disertasi UGM. [↑](#footnote-ref-6)
7. Slamet Muljana, *Op.cit.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Meinsma. 1903. *Serat Babad Tanah Jawi, Wiwit Saking Nabi Adam Dumugi ing Tahun 1647*. S’Gravenhage. [↑](#footnote-ref-8)
9. Baca Slamet Muljana, Opcit. [↑](#footnote-ref-9)
10. Slamet Muljana. Ibid. Hubungan Sri Langka dengan Majapahit telah dimulai sejak pemerintahan Jayanagara, karena dalam Prasasti Sidateka, 1323, raja Jayanagara menggunakan nama abiseka Sri Sundarapandya Adiswara, sedangkan unsur Pandya mengingatkan dinasti Pandya di Sri Langka. Nama Sri Langka sudah dikenal sejak abad tigabelas sebagai daerah otonom Sriwijaya. Persahabatan antara Sri Langka dan Majapahit. Hubungan antara Ayuda dan Majapahit bertarikh disekitrar tahun 1350, setelah Ramadipati berhasil menyerbu Sukhothai dan menawarkan raja Lu Thai pada tahun 1349 kemudian mendirikan kerajaan Dwarawati. [↑](#footnote-ref-10)
11. Priyohutomo, 1934*. Nawaruci*. Groningen: JB. Wolters Uitgevers Maatschapij. [↑](#footnote-ref-11)
12. Moedjanto, 1994. *Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mengenai pengangkatan calon pengganti Patih Gajah Mada pada tahun 1364. Yang hadir pada musyawarah tahun 1364 ialah Ingkang Sinuwun sebagai kepala negara dan kepala kerabat, Tri Buwana Tungga Dewi dan Sri Kerta Wardana, Dyah Wiyah Rajadewi dan Sri Wijayarajasa, Bre Lasem dan Sri Rajasa Wardana, Bre Pajang dan Sri Singa Wardana. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pada tahun 1364 terdiri dari sembilan orang, termasuk Ingkang Sinuwun. Jumlah keanggotaannya bergantung kepada jumlah anggota kerabat yang ada. Rupanya dewan pertimbangan agung itu bersidang setiap kali Ingkang Prabu akan mengambil keputusan mengenai perkara penting yang menghendaki kebulatan pendapat dari para kerabat. [↑](#footnote-ref-14)
15. Dalam pembahasan soal kepegawaian dan gelar sebutannya kita harus membatasi diri sampai zaman Majapahit saja karena pangkat dan gelar sebutan itu berubah dari zaman Mataram dan Majapahit, misalnya gelar rakai atau rake, berbeda maknanya. Demikian pula jabatan mangkubumi pada zaman Majapahit berbeda maknanya dengan mangkubumi pada zaman Surakarta dan Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-15)
16. Yang tergolong pada golongan Rakryan seperti Mahamantri Katrini yakni, mahamantri Hino, mahamantri Sirikan, dan mahamantri Halu. Pasangguhan, yang dapat disamakan dengan hulubalang. Dimana pada zaman Majapahit hanya ada dua jabatan pasungguhan yakni, Pranaraja dan Narapati. Sang Panca Wilwatikta yakni lima orang pembesar yang diserahi urusan pemerintahan Majapahit, mereka itu ialah patih seluruh negara atau patih Majapahit, demung, kanuruhan, rangga, dan tumenggung. [↑](#footnote-ref-16)
17. Pada tanda arya mempunyai kedudukan lebih rendah dari pada golongan rakryan dan disebut dalam prasasti-prasasti sesudah sang panca wilwatikta. Karena jasa-jasanya seorang arya dapat dinaikkakn menjadi wredramantri atau mantri sepuh. Baik sang arya dewaraja Empu Aditya maupun sang arya diraraja Empu Narayana mempunyai kedudukan wredramantri dalam Prasasti Surabaya. [↑](#footnote-ref-17)
18. Golongan dang acarya. Sebutan ini diperuntukkan khusus bagi para pendeta Siwa dan Buda yang diangkat sebagai darmadyaksa: hakim tinggi, atau upapati: pembantu darmayaksa alias hakim. Jumlah darmayaksa ialah dua yakni darmayaksa dalam ke Siwa-an dan darmayaksa dalam ke Buda-an. Jumlah upapati semua hanya lima, semua dalam ke Siwa-an, kemudian ditambah dua upapati kebudaan di Kandanganm Tuha dan Kandanga Rare sehingga jumlahnya menjadi tujuh dalam pemerintahan Prabu Hayamwuruk Sri Rajasa Nagara.

 [↑](#footnote-ref-18)
19. Paugeran (budaya adat tradisi) yang ada di kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dibuat oleh para leluhur dalem kraton Yogyakarta sejak Sultan Hamengkubuwono I yang diikuti dan ditaati secara turun temurun. [↑](#footnote-ref-19)